



Nomor : 156/WK/SEKPER/2024

Jakarta, 23 September 2024

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPO
atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya
Tahap IV Tahun 2019**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan RUPO yang telah dilakukan pada Jumat, 20 September 2024 pada Surat Kabar Investor Daily Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Direksi

Simpanan Perbankan Terus Menyusut

JAKARTA, ID - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan total simpanan perbankan yang dihimpun per Agustus 2024 tumbuh 7% secara tahunan (*year on year/yo*) mencapai Rp 8.698,53 triliun. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya mengalami penurunan 0,3% secara bulanan (*month to month/mtm*).

Oleh Nida Sahara

Rekening simpanan mengalami peningkatan 11,6% (*yo*) menjadi 592,77 juta rekening per Agustus 2024. Jumlah tersebut juga naik 1% dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun, rekening simpanan di bank konvensional tercatat naik 12% (*yo*) menjadi 533 juta rekening, sedangkan rekening syariah sebanyak 28.871 tumbuh 3,7% (*yo*) per Agustus 2024.

Apabila dirinci dari jenis simpanan, tabungan tumbuh 6,1% (*yo*) menjadi Rp 2.745,39 triliun per Agustus 2024, namun menyusut 0,5% (*mtm*). Kemudian, giro masih naik 10,3% (*yo*) menjadi Rp 2.690,47 triliun, tapi turun 0,9% (*mtm*). Deposito tercatat naik 5% (*yo*) menjadi Rp 3.197,68 triliun.

Sementara itu, untuk *deposit on call* tumbuh 17,9% (*yo*) menjadi Rp 63,56 triliun dan naik 13,7% (*mtm*). Serta sertifikat deposito anjlok 46,8% (*yo*) dan juga menyusut 1,8% (*mtm*) per Agustus 2024 menjadi Rp 1,43 triliun.

Berdasarkan kepemilikannya, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,1% (*yo*) menjadi Rp 8.622,84 triliun per Agustus 2024, susut 0,4% (*mtm*). Sedangkan, simpanan dari bank lain Rp 75,69 triliun tumbuh 2,7% (*yo*) atau naik 7,2% (*mtm*). Meski demikian, dengan adanya penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 25 bps ke level 6% dan Fed Fund Rate 50 bps pada September ini diperkirakan mendorong likuiditas perbankan ke depannya, sehingga simpanan akan tumbuh positif.

Terkait hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaera mengatakan, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) akan berdampak positif terhadap kinerja BNI, utamanya dari sisi likuiditas perseroan. "Pertama, potensi penurunan *cost of fund* karena penurunan BI-Rate dapat membawa SRBI rate tenor 12 bulan dibawah 7%

ke depan, menurut kami," imbuh Royke kepada *Investor Daily*, Rabu (18/9/2024) malam.

Kedua, potensi penyaluran kredit BNI yang lebih baik yang sejalan dengan kebijakan insentif likuiditas mak-

(*yo*).

Hal ini sejalan dengan strategi BCA yang fokus pada dana murah (*current account saving account/CASA*). Adapun, per Agustus 2024, rasio CASA bank bersandi saham BBKA ini sebesar 82,02% dari total DPK yang dihimpun. Ini



Distribusi Nominal Simpanan Agustus 2024

Jenis Simpanan	Nominal (Rp T)	Perubahan (%)					
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Ytd	1 Tahun	3 Tahun
Deposit On Call	63,56	13,7	2,4	22,6	1,1	17,9	13,6
Deposito	3197,68	0	-0,2	2,1	4,3	5	12
Giro	2690,47	-0,9	-3	1,5	-0,6	10,3	38,9
Sertifikat Deposito	1,43	-1,8	-74,5	-72,3	-66,8	-46,8	38,3
Tabungan	2745,39	-0,5	1,3	3,6	2,7	6,1	20,6
Total	8698,53	-0,3	-0,7	2,5	2,2	7	22,1

Sumber: LPS

prudensial (KLM) BI. Adapun, hingga minggu kedua September 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp 256,1 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp 118,6 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp 110,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp 24,4 triliun, dan kelompok cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp 2,6 triliun.

LPS juga mencatat, simpanan yang dihimpun bank konvensional mencapai Rp 8.010,94 triliun tumbuh 6,7% (*yo*) namun susut 0,4% (*mtm*). Pertumbuhan tinggi justru dicatatkan oleh bank syariah termasuk UUS sebesar 10,5% (*yo*) menjadi Rp 687,6 triliun dan juga tumbuh 0,3% (*mtm*).

"Laju pertumbuhan DPK diproyeksikan kembali normal meski dengan laju yang lebih stabil. Strategi penghimpunan DPK juga dipengaruhi dinamika persaingan dengan produk dan instrumen investasi non perbankan yang tumbuh signifikan," tutur LPS.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara *bank only* per Agustus 2024 menghimpun DPK sebesar Rp 1.102,28 triliun, tumbuh 4,02% dibandingkan Agustus 2023 senilai Rp 1.059,67 triliun. Apabila dirinci, hanya giro dan tabungan yang mengalami pertumbuhan positif masing-masing 7,21% (*yo*) dan 5,02% (*yo*), sedangkan deposito susut 3,58%

membuat biaya dana (*cost of fund*) perseroan menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan bank lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, suku bunga deposito 1 bulan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,73% stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya. BI juga menilai ketahanan sistem keuangan terjaga baik, tercermin dari likuiditas perbankan pada Agustus 2024 tetap memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang tinggi sebesar 25,37%.

Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) perbankan pada Juli 2024 tergolong kuat yang tercatat tinggi sebesar 26,56%, sehingga mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) perbankan pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,27% (bruto) dan 0,79% (neto).

"Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil *stress test* perbankan terkini. Ke depan, BI terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," kata Perry.



Investor Daily/David Gita Rosa

Peluncuran Asuransi Baru Allianz

Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia Alexander Grenz (kiri), Direktur Utama Allianz Life Syariah Indonesia Achmad K. Permana (tengah) dan Country Chief Product Officer Allianz Indonesia Himawan Purnama, saat peluncuran Allianz Flexi Medical Plan dan Allisya Flexi Medical Plan (AFM Plan) di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Allianz Flexi Medical Plan dan Allisya Flexi Medical Plan (AFM Plan), manfaat tambahan (rider) terbaru dari Allianz Life dan Allianz Syariah, yang merupakan perlindungan kesehatan komprehensif dan fleksibel yang akan melengkapi produk asuransi jiwa unit link.

OJK Siapkan Sistem Deteksi Fraud untuk Industri Asuransi

JAKARTA, ID - Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Iwan Pasila menyampaikan bahwa OJK tengah mempersiapkan database agen asuransi dan juga sistem untuk mendeteksi fraud khusus untuk industri asuransi.

"Saat ini OJK mempersiapkan database agen asuransi dan juga sistem mendeteksi fraud khusus untuk industri asuransi, namun memang perlu waktu untuk penggunaannya," ungkap Iwan pada Forum Pertemuan Para CEO Perusahaan Asuransi Umum, di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Ia pun mengajak diskusi para peserta guna mengetahui *market challenge* ataupun *market overview* dalam praktik lapangan industri asuransi umum. Hal ini untuk mengetahui kondisi industri asuransi yang sebenarnya dalam 10 tahun terakhir.

"Tentu telah banyak juga diskusi-diskusi dengan teman-teman di asosiasi dalam rangka perbaikan, dalam rangka etika

berbisnis di industri asuransi yang mengikuti standar *Good Corporate Governance* (GCG). Tentu ini harus *inline* dengan *roadmap* yang telah kita luncurkan bersama-sama di tahun lalu," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan juga menyampaikan bahwa industri asuransi saat ini dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Adapun tiga topik yang ia sorot yakni soal permodalan, tarif, dan kode etik dalam rangka berbisnis di industri asuransi.

"AAUI juga sudah sering melakukan pertemuan dengan regulator seperti OJK. Bahwa OJK selalu mendorong industri asuransi untuk terus tumbuh berkelanjutan, tidak seperti sekarang," kata dia.

Menurutnya dinamika dari perolehan premi juga menjadi masalah yang sering timbul di industri asuransi seperti adanya perang tarif dan komisi *fee* dari penjualan. Untuk itu, Budi mengatakan, bahwa industri asu-

ransi perlu berbenah. "Hadirnya OJK di forum ini, tentu sebagai langkah awal atau 'pemanasan', untuk kita diskusi lebih dalam lagi di CEO Gathering yang dilaksanakan di Indonesia Rendezvous ke 28," ujarnya.

Budi mengharapkan anggota AAUI bersama-sama intropeksi untuk memperbaiki industri asuransi agar makin baik, dan agar marwah industri asuransi setara dengan industri lainnya di sektor jasa keuangan.

Wakil Ketua AAUI Bidang Hukum, Klaim, dan Keagenan Editha Thalia Desiree menambahkan, pentingnya kode etik di industri asuransi. Ia menyarankan agar semua pihak di industri asuransi terus mematuhi kebijakan maupun peraturan mengenai penerapan GCG yang diatur OJK dalam hal praktik bisnis asuransi ke depannya.

"Hal itu dimaksudkan agar nantinya tidak ada kecurangan dalam berbisnis yang tentunya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada industri asuransi Indonesia," tegas dia. (ks)

BSI Dorong Jatim Jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional

JAKARTA, ID - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya mendorong Jawa Timur menjadi pusat ekonomi syariah nasional.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, BSI melihat Jawa Timur sebagai salah satu wilayah potensial untuk menjadi pusat ekonomi syariah nasional. Menurutnya perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa rasio keuangan, melampaui rata-rata industri. "Hal ini menunjukkan masyarakat semakin memercayai perbankan syariah sebagai bagian dari solusi keuangan mereka," kata Hery, Kamis (19/9/2024).

Dia menegaskan bahwa perseroan melihat potensi besar dalam mengintegrasikan ekosistem Islam di daerah ini sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah. Berdasarkan data pemerintah, Jawa Timur memiliki populasi mayoritas muslim dan keberadaan lebih

dari 6 ribu pesantren serta 51 ribu masjid. Provinsi ini menjadi salah satu wilayah yang strategis dalam pengembangan ekonomi syariah.

Besarnya potensi Jawa Timur dalam pengembangan ekonomi syariah juga ditunjukkan dari data penyaluran pembiayaan syariah. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, pangsa penyaluran pembiayaan syariah di Jawa Timur terus mengalami peningkatan, dari 6% pada 2019 menjadi 7,7% pada kuartal-II 2024.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Jawa Timur juga mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni tumbuh 12,4% secara tahunan pada Juli 2024. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah tersebut tumbuh *double digit* dibandingkan dengan pertumbuhan kredit umum sebesar 4,7%.

Lebih lanjut, menurut Hery, data-data tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional. "Dengan dukungan masyarakat dan

berbagai pihak, BSI optimis ekonomi syariah di Jawa Timur akan terus berkembang pesat," ujar Hery.

Saat ini, kinerja BSI region Jawa Timur memiliki lebih dari 2,5 juta *customer based* dengan nilai DPK mencapai Rp 23,35 triliun dengan penyaluran pembiayaan Rp 16,8 triliun tumbuh 15,01% *year on year*.

Selain itu, dalam rangka memperkuat ekosistem Islam, saat ini BSI telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 700 pesantren di Jawa Timur, untuk mempercepat akselerasi ekonomi syariah. Salah satu inisiatif utamanya adalah digitalisasi pesantren, terutama dalam bidang keuangan, guna meningkatkan efisiensi dan kemandirian ekonomi pesantren.

BSI berkomitmen untuk mendukung pesantren dalam adopsi teknologi modern yang menyederhanakan pengelolaan keuangan. Program ini mencakup penerapan sistem pembayaran dan pelaporan keuangan yang efisien serta penyuluhan dan pelatihan untuk pengelola pesantren. "Digitalisasi ini merupakan

amanat Bapak Presiden dalam segala hal transaksi keuangan. Dengan adanya program dari BSI ini, kami berharap segala transaksi keuangan di dalam pesantren bisa menjadi lebih mudah dan terkelola dengan baik," ungkap Hery.

Tidak hanya itu, pengembangan ekosistem Islam di masjid juga menjadi fokus BSI. Digitalisasi manajemen keuangan masjid diharapkan dapat mempercepat berbagai aktivitas finansial seperti donasi (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) serta pengembangan ekonomi riil di lingkungan masjid.

Masjid sebagai pusat komunitas dinilai memiliki peran strategis dalam menyebarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan adanya solusi digital dari BSI, pengurus masjid dapat memanfaatkan sistem seperti *cash management system*, *virtual account*, dan QRIS untuk memudahkan pengelolaan keuangan dan transaksi.

"Program-program ini mendukung pengurus masjid dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien," tutur Hery. (ks)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwalianan"), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 4 Oktober 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Gedung Waskita Heritage Lt. 11
Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340

Agenda RUPO:

- Penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya:
 - Kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, dan
 - Kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan Emiten sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dan kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
- Penentuan sikap dan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 atas penjelasan dan usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-15, Bunga ke-16, Bunga ke-17, Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dan kewajiban keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("AD") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 20 September 2024

EMITEN
WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT
BANK MEGA TBK